



Gorontalo Development Review

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gdrev>

Vol 09, No 01, Tahun 2026

P-ISSN : 2614-5170, E- ISSN :2615-1375

Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022

Ketika Pertumbuhan Ekonomi Belum Cukup: Determinan Kemiskinan di Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi di Provinsi Jawa Barat

When Economic Growth Is Not Enough: Determinants of Poverty in High-Poverty Regions of West Java Province

Neni Murniati¹, Sakti Hutama², Restu A Suryaman^{3*}, Intan Ramdaniatulfetri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pasundan

Email: restu.suryaman@unpas.ac.id*

Article info

Article history:

Received; 17-12-2025

Revised; 03-02-2026

Accepted; 01-04-2026

Abstract.

This study aims to analyze the determinants of poverty in five districts with high poverty levels in West Java Province. Indramayu Regency, Kuningan Regency, Tasikmalaya City, Majalengka Regency, and Cirebon Regency over the period 2009–2023. The explanatory variables include economic growth, Human Development Index (HDI), open unemployment rate, and income inequality. This study employs secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS) and applies panel data regression analysis. Model selection is conducted using the Chow test and Hausman test, indicating that the Fixed Effect Model is the most appropriate estimation approach. The empirical results reveal that all independent variables jointly have a significant effect on poverty levels. Partially, HDI, open unemployment rate, and income inequality are found to have a statistically significant effect on poverty, while economic growth does not show a significant impact. These findings suggest that poverty in regions with high poverty levels is multidimensional and cannot be explained solely by economic growth performance. Therefore, poverty reduction policies should emphasize improvements in human development, labor market conditions, and income distribution to achieve more inclusive and sustainable poverty alleviation.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di lima daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon, selama periode 2009–2023. Variabel yang dianalisis meliputi pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini

menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Pemilihan model dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, yang menunjukkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model estimasi yang paling sesuai. Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui kinerja pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kualitas pembangunan manusia.

Keywords:

Poverty, Economic Growth, Human Development Index, Open Unemployment Rate, Income Inequality.

Corresponden author:

Email: restu.suryaman@unpas.ac.id

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan penyakit ekonomi yang selalu terjadi di berbagai negara. Pada tingkat mikro, kemiskinan akan berdampak negatif pada kehidupan sosial ekonomi seseorang, pendidikan rendah, penurunan kualitas kesehatan, munculnya kejahatan, dan ketidaknyamanan lainnya (De Hoyos, 2005). Pada tingkat makro, kemiskinan merupakan hasil dari kegiatan ekonomi nasional yang tidak efisien dan tidak produktif yang mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi, yang pada akhirnya akan menghambat berbagai tujuan ekonomi yang ditargetkan (Purwono et al., 2021).

Kemiskinan identik dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Seperti yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, yang mengukur tingkat kemiskinan melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (pendekatan kebutuhan dasar). Konsep ini mengacu pada Buku Pegangan Kemiskinan dan Ketimpangan yang disusun oleh Bank Dunia (Rizky et al., 2024). Metode ini, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan dari perspektif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries* (1953), yang terkenal dengan teori "lingkaran setan kemiskinan", yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang sangat terbatas dan terjadi bukan karena kehendak orang yang bersangkutan tetapi ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah, kinerja rendah, berpenghasilan rendah, kesehatan dan gizi rendah dan kesejahteraan yang buruk (Efendi et al., 2019). Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB yang berjudul "Kemiskinan dan Pembangunan Manusia" mengatakan bahwa: "Kasus pembangunan manusia bukan hanya atau bahkan terutama ekonomi. Lebih sedikit kelaparan, lebih sedikit kematian anak, dan

perubahan pendidikan dasar yang lebih baik hampir diterima secara universal sebagai tujuan penting dalam diri mereka sendiri"

Munculnya masalah kemiskinan di suatu negara erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara akan menyebabkan kesejahteraan, sehingga terhindar dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi identik dengan pertumbuhan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu ekonomi (Abdullah & Wibowo, 2024). Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai: perubahan tingkat output dalam suatu ekonomi dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat tabungan, dan tingkat kemajuan teknologi. Sementara itu, menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan 3 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) peningkatan pasokan barang yang terus menerus, (2) perkembangan teknologi, (3) penggunaan teknologi yang efektif dan efisien. Pendapat Solow dan Kuznets di atas menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan sangat penting dalam meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari kemiskinan (de Bruijn & Antonides, 2022).

Proses pengembangan erat kaitannya dengan peran sumber daya manusia sebagai subjek dan objek dalam proses pembangunan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, terdidik, sehat dan adaptif terhadap proses pembangunan akan menghasilkan hasil pembangunan yang baik (Prihatiningsih & Aldino, 2022). Bank Dunia (1990) dalam laporannya kepada anggota PBB berjudul "Kemiskinan dan Pembangunan Manusia" menyatakan bahwa: "Kasus pembangunan manusia bukan hanya atau bahkan terutama ekonomi. Lebih sedikit kelaparan, lebih sedikit kematian anak, dan perubahan pendidikan dasar yang lebih baik hampir diterima secara universal sebagai tujuan penting dalam diri mereka sendiri". Oleh karena itu, pada tahun 1990, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menekankan pentingnya manusia dan sumber dayanya dalam proses pembangunan (Ifa & Al Maidah, 2023). Indeks ini terbentuk dari rata-rata pengukuran pencapaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan taraf hidup yang layak. Oleh karena itu, daerah dengan IPM tinggi diharapkan cenderung terhindar dari masalah kemiskinan (Fadly & Chandra, 2024).

Pengangguran terbuka telah menjadi masalah ekonomi makro di dunia sejak awal abad ke-20, menyebabkan ekonomi jatuh ke dalam Depresi Hebat. Depresi Besar adalah periode waktu (1929 – 1939) ketika ekonomi dunia jatuh ke titik terendah dan menyebabkan ekonomi hampir terhenti (Lestari et al., 2024). Organisasi Buruh (ILO) mendefinisikan pengangguran terbuka sebagai seseorang yang merupakan bagian dari populasi usia kerja yang belum bekerja untuk jangka waktu tertentu, dan bersedia menerima pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan (Maksimilianus Gai et al., 2025). John Maynard Keynes (1936) menyatakan bahwa pengangguran terbuka adalah kejadian umum dalam perekonomian karena kegagalan pasar. Pengangguran dalam perekonomian akan melemahkan daya beli masyarakat dan menyebabkan kemiskinan.

Proses pembangunan menyebabkan peningkatan tingkat kesejahteraan sosial tetapi juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Menurut Smith dan Todaro (2006), ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat, yang mengakibatkan distribusi pendapatan nasional yang tidak merata di antara masyarakat (Faturohim et al., 2023). Ketimpangan pendapatan dalam proses pembangunan juga dikatakan oleh Booth dan Peter Mc Cawley bahwa "di banyak negara memang ada peningkatan

tingkat kesejahteraan sosial yang diukur dengan pendapatan per kapita, tetapi hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sementara mayoritas orang miskin mendapatkan sedikit manfaat, bahkan sangat dirugikan". Mengutip pendapat Booth dan Peter Mc Cawley, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan kemiskinan (Hariadi, 2009).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, di Provinsi Jawa Barat terdapat 5 kotamadya/kabupaten yang merupakan daerah termiskin di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kotamadya Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana semua penentu kemiskinan mempengaruhi angka kemiskinan di masing-masing kotamadya/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ada 4 penentu kemiskinan yang diasumsikan dalam penelitian ini, yaitu: pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masing-masing kotamadya/kabupaten untuk menghindari permasalahan kemiskinan.

Secara agregat, Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tren provinsi tersebut menyimpan puzzle empiris berupa persistensi "kantong kemiskinan" pada wilayah tertentu. Data kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat memperlihatkan bahwa pada 2025 tingkat kemiskinan provinsi berada pada 7,02%, sementara beberapa daerah masih bertahan pada dua digit dan relatif sulit turun dibanding wilayah lain (Statistik.jabarprov, 2025). Hal ini menandakan bahwa penurunan kemiskinan di tingkat provinsi tidak otomatis berarti perbaikan yang merata pada seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan data resmi deret waktu 2021–2025, lima wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan konsisten berada pada kelompok atas adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon. Pada 2025, kemiskinan kelima wilayah tersebut masing-masing masih berada di sekitar 11,02% (Indramayu), 10,74% (Kuningan), 10,84% (Kota Tasikmalaya), 10,31% (Majalengka), dan 10,23% (Kab. Cirebon), sementara provinsi 7,02% (Statistik.jabarprov, 2025). Dengan demikian, pemilihan lima wilayah dalam penelitian ini bukan sekadar deskriptif, melainkan berbasis kriteria kuantitatif yang dapat diverifikasi: peringkat kemiskinan tertinggi (2025) dan persistensi tingkat kemiskinan tinggi selama 2021–2025 (Statistik.jabarprov, 2025).

Keunikan lima wilayah tersebut menjadi semakin relevan ketika dibaca bersamaan dengan dinamika makro Jawa Barat. Pada satu sisi, perekonomian Jawa Barat tetap tumbuh (seperti tahun 2024 tumbuh 4,95%) dan indikator pembangunan manusia provinsi meningkat (IPM Jawa Barat 2025 mencapai 75,90) (BPS Jawa Barat, 2025). Pada sisi lain, pasar kerja dan distribusi hasil pembangunan berpotensi menjadi penjelas mengapa kemiskinan tidak turun merata. TPT Jawa Barat masih relatif tinggi (seperti 6,77% pada Agustus 2025) dan ketimpangan pengeluaran (Gini) juga berada pada level yang patut diperhatikan (seperti 0,416 pada Maret 2025, termasuk peringkat tinggi secara nasional) (BPS Jawa Barat, 2025). Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup jika penciptaan kerja dan pemerataan hasil pertumbuhan tidak mengimbangi.

Di titik inilah gap riset muncul. Banyak studi menguji determinan kemiskinan pada cakupan besar (nasional/provinsi/seluruh kabupaten-kota) sehingga temuan cenderung "rata-rata" dan berisiko menutupi mekanisme yang bekerja pada wilayah dengan kemiskinan tinggi dan persisten. Akibatnya, rekomendasi kebijakan yang

dihasilkan sering kurang presisi untuk kantong kemiskinan spesifik. Penelitian ini menawarkan novelty empiris dengan memfokuskan analisis pada sub-sampel wilayah “high-poverty, persistent” di provinsi yang ekonominya besar, sehingga dapat menjawab pertanyaan yang lebih operasional: di antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, pengangguran, dan ketimpangan, faktor mana yang paling konsisten menjelaskan kemiskinan di lima wilayah ini—serta apakah arah pengaruhnya sejalan dengan teori dan bukti umum?

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan/pengeluaran (Gini) terhadap kemiskinan di lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Fokus ini diharapkan membantu pemerintah daerah menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran, terutama pada kombinasi kebijakan pro-pertumbuhan yang berorientasi penciptaan kerja dan strategi peningkatan kualitas SDM yang berdampak langsung pada daya beli kelompok rentan.

Secara operasional, penelitian ini memposisikan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang diperkirakan menurunkan kemiskinan (hubungan negatif), karena peningkatan output daerah pada dasarnya memperluas aktivitas produksi, peluang kerja, dan pendapatan masyarakat—terutama jika pertumbuhan tersebut tersalurkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja (Abdullah & Wibowo, 2024). Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diperkirakan berhubungan negatif dengan kemiskinan, sebab perbaikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup meningkatkan produktivitas serta kapasitas rumah tangga untuk keluar dari kondisi deprivasi ekonomi (Prihatiningsih & Aldino, 2022). Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperkirakan berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena pengangguran mengurangi sumber pendapatan rumah tangga, melemahkan daya beli, dan meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi. Terakhir, ketimpangan pendapatan/pengeluaran (misalnya diukur dengan Gini ratio) diperkirakan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, karena ketika distribusi hasil pertumbuhan timpang, manfaat pembangunan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok atas sehingga kelompok bawah menerima manfaat yang lebih kecil dan lebih rentan tertinggal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan lembaga tepercaya lainnya, dengan variabel utama meliputi tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan (KP) sebagaimana definisi operasional dan satuannya dirangkum pada Tabel Deskripsi Variabel. Tahap awal analisis ditujukan untuk tujuan komparatif, yaitu membandingkan kelima indikator tersebut pada masing-masing wilayah penelitian dengan menyusun matriks seluruh variabel pada seluruh daerah guna mengidentifikasi nilai ekstrem (tertinggi/terendah) dan pola perbedaan antarwilayah selama periode pengamatan.

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi Variabel	Indikator / Ukuran	Satuan	Sumber Data
Tingkat Kemiskinan (K)	Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing daerah selama periode penelitian.	Persentase penduduk miskin	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Pertumbuhan PDRB ADHK	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)

	atas dasar harga konstan sebagai indikator kinerja ekonomi daerah.			
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks komposit yang mencerminkan capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.	Nilai IPM	Indeks	Badan Pusat Statistik (BPS)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Ketimpangan Pendapatan (KP)	Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antarpenduduk di suatu daerah.	Rasio Gini	Indeks	Badan Pusat Statistik (BPS)

Sumber : data BPS

Selanjutnya, penelitian menguji secara kuantitatif pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, TPT, dan KP terhadap tingkat kemiskinan pada 5 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Barat menggunakan regresi data panel. Struktur data panel didefinisikan sebagai gabungan dimensi *i* (cross-section: 5 kabupaten/kota) dan *t* (time series: 2009–2023, 15 tahun), sehingga secara konseptual membentuk panel seimbang sebanyak 75 observasi (5×15). Apabila pada tahap pembersihan data ditemukan nilai hilang (missing values) pada salah satu variabel/tahun, maka penanganannya dinyatakan eksplisit dengan melaporkan (i) jumlah observasi sebelum–sesudah pembersihan, (ii) lokasi missing (daerah/tahun/variabel), dan (iii) pendekatan yang dipakai (misalnya listwise deletion untuk menjaga konsistensi estimasi, atau interpolasi terbatas hanya bila metode tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diuji sensitivitasnya). Bagian ini perlu ditulis sebagai informasi replikasi, termasuk jumlah observasi akhir yang digunakan dalam estimasi.

Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 KP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan

- K = tingkat kemiskinan
- PE = Pertumbuhan ekonomi
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
- KP = ketimpangan pendapatan
- β_0 = Konstanta
- ε = Kesalahan
- i* = 5 Kabupaten/Kota Kemiskinan Tinggi di Provinsi Jawa Barat
- t* = Periode waktu (2009-2023)

Dengan K_{it} adalah tingkat kemiskinan di daerah *i* pada tahun *t*; PE_{it} pertumbuhan ekonomi; IPM_{it} indeks pembangunan manusia; TPT_{it} tingkat pengangguran terbuka; KP_{it} ketimpangan pendapatan; β_0 konstanta; β_1 – β_4 koefisien; u_i menangkap heterogenitas tak teramati yang tetap (time-invariant) pada masing-masing daerah (fixed effect daerah); dan ε_{it} adalah galat idiosinkratik. Notasi *i* merepresentasikan 5 kabupaten/kota dan *t* periode 2009–2023 sebagaimana telah didefinisikan. Untuk menjaga ketertelusuran, model ini juga dapat dituliskan dalam bentuk pooled OLS (tanpa u_i), serta opsi random effect (dengan komponen galat khusus daerah bersifat acak) sebagai pembandingan pada tahap pemilihan model.

Pemilihan model panel terbaik dilakukan melalui rangkaian uji yang memang

sudah disebutkan dalam naskah, namun kini perlu dilaporkan hasilnya secara ringkas dan konsisten: (1) Chow test digunakan untuk membandingkan pooled OLS versus fixed effect; (2) LM test (Breusch–Pagan) digunakan untuk membandingkan pooled OLS versus random effect; dan (3) Hausman test digunakan untuk menentukan fixed effect versus random effect (berbasis perbedaan konsistensi estimator). Setiap uji dilaporkan minimal mencakup nilai statistik uji, p-value, serta keputusan model (“Chow $p < 0,05 \rightarrow$ FE lebih tepat daripada pooled”). Jika LM test pada praktiknya tidak dijalankan (karena langsung membandingkan FE vs RE), maka penyebutannya harus dihapus; namun jika tetap digunakan, maka hasil LM wajib disajikan dalam bagian hasil agar proses pemilihan model dapat direplikasi.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Analisis pertama dalam penelitian ini adalah melakukan elaborasi terkait karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian yang meliputi tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, wilayah yang dikaji adalah 5 daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2009 – 2023, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon.

Tabel 2. Matriks tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan di daerah kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Barat 2009 – 2023

Variabel	Rata-rata				
Tingkat Kemiskinan	Tasikmalaya Municipality [15,84]	Indramayu Regency [14,10]	Cirebon Regency [13,49]	Kuningan Regency [13,32]	Majalengka Regency [13,13]
Pertumbuhan Ekonomi	Kuningan Regency [5,49]	Majalengka Regency [5,42]	Tasikmalaya Municipality [5,10]	Cirebon Regency [4,48]	Indramayu Regency [2,92]
Index Pembangunan Manusia	Tasikmalaya Municipality [70,99]	Kuningan Regency [67,88]	Cirebon Regency [67,14]	Majalengka Regency [65,94]	Indramayu Regency [65,27]
Tingkat Pengangguran Terbuka	Cirebon Regency [11,37]	Indramayu Regency [8,71]	Kuningan Regency [8,68]	Tasikmalaya Municipality [7,17]	Majalengka Regency [5,42]
Ketimpangan Pendapatan	Tasikmalaya Municipality [0,390]	Kuningan Regency [0,349]	Majalengka Regency [0,334]	Cirebon Regency [0,326]	Indramayu Regency [0,280]

Sumber : data BPS

Berdasarkan matriks rata-rata (Tabel 2), terlihat bahwa tingkat kemiskinan rata-rata tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya (15,84), disusul Kabupaten Indramayu (14,10) dan Kabupaten Cirebon (13,49). Karakteristik kemiskinan di lima daerah termiskin Provinsi Jawa Barat selama periode 2009–2023 menunjukkan heterogenitas yang penting: pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi terdapat di Kabupaten Kuningan (5,49) dan Kabupaten Majalengka (5,42), tetapi capaian tersebut tidak otomatis berasosiasi dengan kemiskinan terendah di seluruh wilayah kajian. IPM tertinggi berada di Kota Tasikmalaya (70,99), sementara Kabupaten Indramayu dan Majalengka memiliki IPM relatif lebih rendah. Tingkat pengangguran terbuka rata-rata tertinggi terdapat di Kabupaten Cirebon (11,37) dan Kabupaten Indramayu (8,71), sedangkan ketimpangan pendapatan rata-rata tertinggi tercatat di Kota Tasikmalaya (0,390). Temuan deskriptif ini memperkuat indikasi bahwa

kemiskinan di wilayah kajian tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas pembangunan manusia, dinamika pasar kerja, dan distribusi pendapatan.

Pemilihan model estimasi panel data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa model Common Effect lebih tepat ditolak. Dengan demikian, model yang lebih sesuai untuk digunakan adalah model Fixed Effect.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.341029	(9,45)	0.0033
Cross-section Chi-square	30.704922	9	0.0003

Sumber : data olahan, 2025

Tahap berikutnya adalah pemilihan model panel. Hasil uji Chow menunjukkan probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square lebih kecil dari 0,05 ($p=0,0033$ dan $p=0,0003$), sehingga model common effect ditolak dan model yang lebih sesuai adalah fixed effect. Selanjutnya, uji Hausman menunjukkan $p=0,0004$ ($<0,05$), sehingga fixed effect dinyatakan lebih konsisten dibanding random effect. Berdasarkan kedua pengujian tersebut, model estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk menentukan pemilihan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Chi-square yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak dan Fixed Effect Model dinyatakan lebih konsisten dibandingkan Random Effect Model. Berdasarkan hasil kedua pengujian tersebut, maka model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.568949	5	0.0004

Sumber : data olahan, 2025

Hasil pengujian model menyatakan bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang paling cocok untuk data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil regresi data panel menggunakan *fixed effect model* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.67302	4.523238	8.770934	0.0000
PE	0.094887	0.077839	1.219014	0.2273
IPM	-0.290653	0.061545	-4.722606	0.0000
TPT	0.195216	0.087428	2.232875	0.0291
KP	-23.99606	3.408802	-7.039440	0.0000
R-squared	0.643034	F-statistic		14.41108
Adjusted R-squared	0.598413	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : data olahan, 2025

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) disajikan pada Tabel 5. Nilai konstanta (C) sebesar 39,67 dan signifikan pada tingkat

kepercayaan 1 persen menunjukkan nilai rata-rata tingkat kemiskinan ketika seluruh variabel independen diasumsikan bernilai nol. Secara keseluruhan, model menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari nilai F-statistic sebesar 14,41 dengan probabilitas 0,0000, yang mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, nilai R-squared sebesar 0,643 dan adjusted R-squared sebesar 0,598 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat terhadap variasi data tingkat kemiskinan antarwilayah dan antarwaktu. Secara parsial, hasil uji t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki koefisien sebesar 0,095 dengan nilai probabilitas 0,2273, yang berarti variabel ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki koefisien negatif sebesar -0,291 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara IPM dan tingkat kemiskinan dalam model. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki koefisien positif sebesar 0,195 dan signifikan pada tingkat 5 persen, yang mengindikasikan bahwa variabel ini berperan signifikan dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan (KP) menunjukkan koefisien negatif sebesar -23,996 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen, menandakan bahwa variabel ini secara statistik berpengaruh kuat dalam model yang diestimasi.

Dengan mempertimbangkan hasil uji simultan dan parsial tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model yang digunakan telah mampu menangkap variasi karakteristik spesifik antarwilayah selama periode pengamatan. Signifikansi sebagian besar variabel independen serta nilai koefisien determinasi yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa model empiris ini layak digunakan sebagai dasar untuk pembahasan lanjutan pada bagian diskusi dan implikasi kebijakan.

Pembahasan

Hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di lima daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2009–2023. Pendekatan fixed effect memungkinkan pengendalian terhadap karakteristik spesifik daerah yang bersifat tetap sepanjang waktu, sehingga hubungan antara variabel independen dan tingkat kemiskinan dapat dianalisis secara lebih akurat dan tidak bias oleh heterogenitas struktural antarwilayah.

Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Temuan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi daerah belum secara otomatis bersifat pro-poor. Hasil ini sejalan dengan temuan Fosu (2011, 2015) yang menegaskan bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada tingkat ketimpangan dan struktur ekonomi. Dalam konteks daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang memiliki keterkaitan lemah dengan rumah tangga miskin, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi terbatas. Temuan ini juga menyempurnakan hasil penelitian Suryahadi et al. (2012) dan Dartanto dan Nurkholis (2013) di Indonesia, yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional tidak selalu berimplikasi langsung pada pengurangan kemiskinan tanpa didukung penciptaan lapangan kerja yang inklusif.

Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menegaskan pentingnya kualitas pembangunan manusia dalam menekan kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian UNDP (2016, 2020) serta studi empiris oleh Ginting et al. (2018) dan Miranti (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan memiliki kontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, rendahnya IPM mempersempit akses masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi produktif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyempurnakan literatur dengan menegaskan bahwa IPM tidak hanya berperan sebagai indikator kesejahteraan, tetapi juga sebagai determinan struktural kemiskinan regional.

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan studi Fields (2011) dan ILO (2020) yang menekankan bahwa keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak merupakan salah satu mekanisme utama pembentukan kemiskinan. Dalam konteks daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat, pengangguran cenderung bersifat struktural akibat ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dan rendahnya diversifikasi ekonomi daerah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian regional di Indonesia oleh Priyono dan Fitriani (2019) serta Klasen dan Pieters (2015), yang menunjukkan bahwa penurunan pengangguran memiliki peran yang lebih langsung dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi agregat.

Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan

Ketimpangan pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merupakan faktor kunci dalam dinamika kemiskinan daerah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fosu (2011), UNDP (2019), serta Islam dan McGillivray (2020) yang menemukan bahwa ketimpangan yang tinggi melemahkan dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Dalam daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, ketimpangan pendapatan membatasi kemampuan kelompok miskin untuk mengakses layanan dasar dan peluang ekonomi, sehingga memperkuat kemiskinan struktural. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyanggah pandangan bahwa fokus kebijakan pada pertumbuhan ekonomi semata sudah cukup untuk menurunkan kemiskinan tanpa disertai perbaikan distribusi pendapatan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kemiskinan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor tunggal. Ketidaksignifikanan pertumbuhan ekonomi serta signifikannya IPM, pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan menyempurnakan literatur empiris mutakhir dengan menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kualitas. Hasil ini memperkuat konsensus terbaru dalam studi pembangunan bahwa pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara kebijakan pembangunan manusia, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan distribusi pendapatan (UNDP, 2020; World Bank, 2022).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di lima daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Barat selama periode 2009–2023 menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan

ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Secara parsial, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan hanya oleh kinerja pertumbuhan ekonomi semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Barat tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, terutama melalui perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan produktif guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka, serta memperkuat kebijakan yang mendukung pemerataan pendapatan. Integrasi kebijakan ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan secara simultan menjadi kunci dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

Buku:

- Fields, G. S. (2011). *Working hard, working poor: A global journey*. Oxford University Press.
- Fosu, A. K. (2011). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. *OECD Development Centre Working Paper No. 297*.

Jurnal

- Abdullah, & Wibowo, M. G. (2024). The Effect of Human Development Index (HDI), Inequality and Consumption on Poverty Levels in All Provinces in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(2), 257–269. <https://doi.org/10.20473/jiet.v9i2.59249>
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). The determinants of poverty dynamics in Indonesia: Evidence from panel data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- de Bruijn, E. J., & Antonides, G. (2022). Poverty and economic decision making: a review of scarcity theory. *Theory and Decision*, 92(1), 5–37. <https://doi.org/10.1007/s11238-021-09802-7>
- Efendi, R., Indartono, S., & Sukidjo, S. (2019). The Relationship of Indonesia's Poverty Rate Based on Economic Growth, Health, and Education. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(2), 323. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i2.704>
- Fadly, F., & Chandra, A. (2024). Human Development To Democracy: An Impact Analysis of Poverty and Income Inequality In Indonesia. *Income Inequality In Indonesia. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 13(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/sjie.v13i2.42285>
- Faturohim, A., Akbar, A., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2023). An Analysis of Urban Poverty and Unemployment. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 309–324. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.309-324>
- Fosu, A. K. (2015). Growth, inequality, and poverty in Sub-Saharan Africa: Recent progress in a global context. *Oxford Development Studies*, 43(1), 44–59. <https://doi.org/10.1080/13600818.2014.964195>
- Ginting, A. M., Rahayu, S., & Wibowo, M. G. (2018). Human development and poverty reduction in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 133–143.

- Hariadi, H. (2009). Economic Growth, Income Distribution and Poverty in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 1(3), 219–231.
- Ifa, K., & Al Maidah, F. (2023). The Influence of Economic Growth, Education and Health on Poverty in East Java Province. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 7(2), 157–170.
- Islam, M. R., & McGillivray, M. (2020). Wealth inequality, governance and economic growth. *Economic Modelling*, 88, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.07.003>
- Klasen, S., & Pieters, J. (2015). What explains the stagnation of female labor force participation in urban India? *World Bank Economic Review*, 29(3), 449–478.
- Lestari, A., Yasin, M., & Masrun, M. (2024). THE EFFECT OF INCOME INEQUALITY AND POVERTY ON ECONOMIC GROWTH IN EAST LOMBOK DISTRICT. *Journal of Finance, Economics and Business*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.109>
- Maksimilianus Gai, A., Marito Sir, M., Alvionita Paru, M., & Aryunto, P. (2025). THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, HUMAN DEVELOPMENT INDEX, AND OPEN UNEMPLOYMENT RATE ON POVERTY LEVELS IN SUMENEP REGENCY. In *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* (Vol. 8, Issue 2).
- Miranti, R. (2020). Poverty reduction in Indonesia: The role of human capital and labor markets. *Journal of Asian Economics*, 69, 101216. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101216>
- Prihatiningsih, A., & Aldino, W. (2022). The Effect of Per Capita Income, Human Development Index and Open Unemployment Rate on Poverty in Tebo District. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 5(4), 184–188. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v5i3.288>
- Purwono, R., Wardana, W. W., Haryanto, T., & Khoerul Mubin, M. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- Rizky, M. D., Lubis, S. N., & Kesuma, S. I. (2024). Economic Growth, Poverty, Unemployment, and the Human Development Index (HDI) in Mitigating Socio-economic Disparities in North Sumatra (2019-2023): An Econometric Case Study. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 21(12), 302–311. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2024/v21i12938>
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic growth and poverty reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 209–227.

Website :

- ILO. (2020). *Global employment trends 2020*. International Labour Organization.
- UNDP. (2016). *Human development report 2016: Human development for everyone*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2019). *Human development report 2019*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2022). *Poverty and shared prosperity 2022*. World Bank.